

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Peneliti sudah menguraikan temuan dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan MKWK di perguruan tinggi Jawa Barat. Selanjutnya pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan mengenai empat masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut.

5.1.1. Berdasarkan 6 (enam) indikator konten kebijakan MKWK dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator memiliki kondisi tersendiri baik dari segi kelebihan maupun hal-hal yang belum optimal sehingga masih harus ditingkatkan lagi. Dari 6 indikator ini yaitu sebagai berikut.

5.1.1.1. Kepentingan yang terpengaruh. Pada indikator ini pengaruh kepentingan terhadap konten kebijakan di perguruan tinggi tidak menimbulkan masalah yang begitu krusial. Adapun hal hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu kajian tentang integrasi MKWK dengan kepentingan institusional perguruan tinggi agar dapat berjalan beriringan. Kemudian akomodasi berbagai kepentingan belum optimal karena beberapa perguruan tinggi belum memiliki unit khusus untuk mengelola MKWK. Terakhir beberapa perguruan tinggi memiliki kendala anggaran, sumberdaya dan jenjang karir dalam mengakomodasi semua kepentingan pihak yang terpengaruh oleh kebijakan.

5.1.1.2. Ragam Manfaat. Pada indikator ini ragam manfaat dari MKWK yaitu sebagai sarana pembinaan dan penguatan karakter mahasiswa. Bagi pemerintah, MKWK ditunjukan untuk membentuk warga negara yang berkarakter baik (*to be a good citizenship*) dalam konteks MKWK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (keyakinan terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air). Bagi mahasiswa membentuk karakter dan wawasan yang luas tentang negara dan bangsanya serta kehidupan global. Bagi masyarakat, menghasilkan

mahasiswa yang dapat berkontribusi positif dan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan yang dirancang oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dimana harus memiliki manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat secara luas. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu kajian mengenai ragam manfaat yang dapat menyandingkan visi misi serta karakteristik lembaga dengan tujuan mata kuliah MKWK agar keduanya dapat beriringan dan tidak didominasi oleh ego institusional. Hal ini dapat diatasi dengan pengaturan ragam manfaat konten kebijakan MKWK yang memperhatikan dua jenis karakter yaitu moral dan kinerja.

- 5.1.1.3. Sejauhmana Perubahan yang Dibayangkan. Pada indikator ini perubahan yang ditargetkan dari mata kuliah MKWK sudah berfokus sebagaimana yang diinginkan kebijakan mata kuliah MKWK. Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu menurunkan arogansi mahasiswa, dosen dan egosektoral oleh lembaga yang terlibat agar implementasinya lebih optimal sesuai yang direncanakan. Pengelolaan MKWK yang harus lebih terstruktur lagi, sehingga perubahan yang dibayangkan tidak diterjemahkan oleh para pelaksana dengan berbeda-beda. Kemudian tidak berfokus pada tuntutan konten saja namun juga internalisasi nilai-nilai karakter.
- 5.1.1.4. Kedudukan/Tempat Pembuat Kebijakan. Pada indikator ini secara garis besar jarak antara pembuat kebijakan baik secara geografis maupun organisasi tidak menjadi masalah yang krusial, masalah pada indikator ini lebih banyak terjadi karena egosektoral yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan komunikasi dan manajemen yang baik dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari tingkat perguruan tinggi, fakultas sampai program studi. Kemudian para pihak yang berkedudukan dalam membuat kebijakan kurang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik serta di beberapa perguruan tinggi mereka memiliki masalah kelembagaan. Terdapat kampus yang

tersebar berjauhan sehingga pengelolaan MKWK diberikan otonomi pada setiap fakultas. Akibatnya pengelolaan MKWK menjadi tidak seragam dan komunikasi antar fakultas menjadi sulit untuk dilakukan, sehingga kebijakan MKWK sulit juga untuk ditetapkan menyeluruh dan diterima oleh semua pihak. Terakhir kebijakan MKWK baiknya tidak hanya diambil oleh pihak manajemen kampus yang paling tinggi saja, sehingga dosen yang mengimplementasikan MKWK tidak dilibatkan dan dikhawatirkan dosen menjadi kurang partisipatif.

5.1.1.5. Para Pelaksana Program. Pada indikator ini secara menyeluruh masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki para pelaksana kebijakan sesuai dengan kompetensinya dan sudah memiliki sikap yang berusaha mengikuti kebijakan sesuai dengan peran masing-masing. Setiap perguruan tinggi yang menjadi subjek penelitian mempertimbangkan kompetensi, latar belakang pendidikan, pengembangan yang dilakukan serta sikap dari dosen yang mengimplementasikan kebijakan tersebut sebelum memilih mereka sebagai seorang pengajar. Sehingga para indikator ini sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

5.1.1.6. Sumber Daya yang Dikerahkan/Disepakati. Pada indikator ini keseluruhan perguruan tinggi sudah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang pembelajaran MKWK. Namun hambatan yang masih terjadi pada indikator ini yaitu masalah jumlah sumber daya manusianya dimana perbandingan antara para pelaksana (dosen) tidak sebanding dengan mahasiswa yang harus dilayani. Lima dari enam perguruan tinggi mengungkapkan mereka masih mengalami masalah tersebut. Hal ini berdampak pada waktu dan beban kerja dosen menjadi sangat banyak. Selain itu, masalah yang sebagian besar perguruan tinggi rasakan pada indikator ini adalah anggaran yang masih kurang bagi implementasi MKWK.

5.1.2. Berdasarkan 3 (tiga) indikator konteks kebijakan MKWK dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator memiliki kondisi tersendiri

baik dari segi kelebihan maupun hal-hal yang belum optimal sehingga masih harus ditingkatkan lagi. Dari 3 (tiga) indikator ini yaitu sebagai berikut.

5.1.2.1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Pada indikator ini terdapat beberapa perguruan tinggi dimana *top* aktor kurang memainkan peran penting dalam mensinergikan kepentingan kampus dan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Kemudian pada beberapa kampus juga implementator yang memiliki kekuasaan belum terlihat mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan. Terkadang pihak yang terpengaruh juga merasa dirugikan akibat tidak ditampungnya perbedaan kepentingan tersebut dari kebijakan yang sudah ditetapkan lembaga. Pada perguruan tinggi lain ditemui bahwa peran kekuasaan belum berusaha untuk mengendalikan perbedaan kepentingan dari pelaksana kebijakan sehingga masalah ego sektoral seringkali muncul akibatnya MKWK sulit untuk diimplementasikan dengan optimal. Kemudian kebanyakan perguruan tinggi belum memiliki strategi khusus yang digunakan untuk mengakomodir kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak. Akibatnya banyak dosen yang melakukan tindakan namun diluar ketentuan kebijakan dan berusaha melakukan penyesuaian dalam menyampaikan materi berdasarkan idealisme dosen masing-masing.

5.1.2.2. Lembaga dan rezim yang berkuasa. Pada indikator ini sebagian besar lembaga sudah mendukung dalam implementasi kebijakan MKWK di masing-masing perguruan tinggi. Bentuk dukungan ini dapat terlihat dari aturan MKWK di perguruan tinggi yang sudah mengikuti aturan pemerintah, pemenuhan atas kebutuhan para pelaksana program, memberikan fasilitas bagi pelaksanaan MKWK, diberikan sarana dan prasarana yang memadai, dan lembaga mendukung untuk para pelaksana melakukan pengembangan diri agar kualitas pendidikan dan pembelajaran

menjadi lebih berkualitas. Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu perbaikan masalah kelembagaan dimana karakteristik lembaga masih memiliki cara berpikir atau paradigma lama sehingga perubahan MKWK di kampus menjadi sulit. Kemudian masih terdapat beberapa kampus yang rezimnya belum terlalu mendukung. Terkadang rezim ditingkat perguruan tinggi dengan rezim ditingkat pemerintahan memiliki perbedaan mengenai target yang ingin dicapai sehingga diperlukan penyesuaian. Begitupun rezim pada sektor-sektor menengah masih kurang memiliki komunikasi yang baik. Selain itu, rezim pada sektor program studi juga masih memiliki ego sektoral dimana mereka memfokuskan pada mata kuliah keilmuan jurusan mereka sehingga kadang terjadi ketidaksetujuan pada aturan MKWK yang sudah ditetapkan perguruan tinggi.

5.1.2.3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Pada indikator ini secara garis besar, para pelaksana implementasi kebijakan sudah memiliki kepatuhan yang baik kepada aturan yang sudah ditetapkan perguruan tinggi walaupun dalam kenyataannya terdapat beberapa kendala namun kepatuhan dapat dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kendatipun demikian terdapat perguruan tinggi yang mendapatkan kendala dimana tidak semua program studi dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan perguruan tinggi yang disebabkan ego sektoral. Akibatnya belum ada keseragaman kurikulum dalam pelaksanaan MKWK di perguruan tinggi tersebut.

5.1.3. Proses implementasi kebijakan MKWK dapat disimpulkan bahwa pada sebagian besar perguruan tinggi derajat keterlaksanaan sudah sesuai dengan konten kebijakan MKWK. Walaupun terkadang terkendala oleh beberapa hal seperti masalah kelembagaan dan akomodasi kepentingan dari pihak yang terpengaruh, namun kebanyakan para pelaksana berusaha profesional untuk mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan MKWK walaupun didalamnya harus terjadi berbagai

penyesuaian. Beberapa hambatan sering terjadi yaitu masalah kelembagaan dan birokrasi, pengaturan mata kuliah, alokasi waktu, kekurangan dosen, terbatasnya komunikasi dan koordinasi serta ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban para pelaksana seperti halnya honor.

- 5.1.4. Efektivitas ketercapaian (*outcomes*) implementasi kebijakan MKWK dilihat dari 2 (dua) indikator menyimpulkan bahwa dampak perubahan bagi individu dan kelompok serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan MKWK yang keduanya indikator ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Pada indikator pertama sudah seharusnya MKWK memberikan dampak baik kepada mahasiswa sebagai individu yang memiliki bekal sebagai warga negara berkarakter baik yang memiliki penguatan keyakinan terhadap ideologi Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan kecintaan terhadap tanah air dan harus mampu berdampak juga kepada masyarakat secara luas dalam memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari masyarakat agar hidup harmonis. Pada indikator kedua penerimaan masyarakat terhadap MKWK dapat terjadi jika implementasi MKWK dilakukan dengan baik. Akan tetapi saat ini masyarakat belum sepenuhnya paham pada tujuan dan arah perubahan yang diharapkan MKWK. Kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam MKWK menyebabkan penerimaan MKWK kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan masyarakat. Kurangnya edukasi ini bisa diatasi dengan para pemangku kebijakan di perguruan tinggi melibatkan tokoh masyarakat sebagai *stakeholder* untuk bekerjasama dalam pelaksanaan MKWK yang baik. Namun saat ini, hal itu belum mampu terwujud dengan maksimal. Maka dari itu, penting untuk perguruan tinggi, orang tua dan masyarakat saling mendukung untuk optimalisasi implimentasi MKWK di perguruan tinggi karena masyarakat juga menjadi variabel yang menentukan kebijakan MKWK berhasil atau tidak. Kemudian Pendidikan Karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi di kampus namun juga orang tua dan lingkungan masyarakat.

5.2. Implikasi

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam pembinaan karakter mahasiswa di perguruan tinggi, peneliti melihat terdapat beberapa implikasi kepada pihak terkait agar penelitian ini tidak hanya sebuah tulisan di atas kertas yang tidak memiliki kebermanfaatan. Adapun implikasi tersebut yaitu sebagai berikut.

5.2.1. Bagi Dinas Pendidikan Tinggi

Pada Dinas Pendidikan Tinggi penelitian ini berimplikasi pada pentingnya untuk merancang ragam manfaat MKWK yang memiliki manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat secara luas dengan memperhatikan karakter moral dan karakter kinerja serta mensosialisasikan dan memastikan sosialisasi tersebut sampai dengan baik kepada setiap perguruan tinggi agar terdapat persamaan persepsi.

5.2.2. Bagi Perguruan Tinggi di Jawa Barat

Pada perguruan tinggi di Jawa Barat penelitian ini berimplikasi pada *top* aktor di perguruan tinggi yang harus memiliki peran penting dalam mensinergikan kepentingan kampus dan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Kemudian *top* aktor di perguruan tinggi penting untuk memiliki strategi dalam mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan MKWK, untuk meminimalisir ego sektoral kampus. Kemudian kebanyakan perguruan tinggi belum memiliki strategi khusus yang digunakan untuk mengakomodir kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak. Penting juga untuk membentuk unit khusus dalam mengelola MKWK agar segala masalah dalam MKWK dapat diatasi dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasinya. Penting untuk memberikan dukungan kepada implementator di lapangan baik dari segi anggaran, sumberdaya dan jenjang karir. Penting juga untuk melibatkan dosen dalam perancangan kebijakan MKWK, sehingga para implementator di kelas mampu memiliki dedikasi. Terakhir penting untuk para *top* aktor merubah paradigma lama agar implementasi sesuai dengan tantangan dan tuntutan jaman.

5.2.3. Bagi Setiap Fakultas dan Program Studi di Perguruan Tinggi yang Berada di Jawa Barat

Pada Fakultas dan Program Studi di perguruan tinggi yang Berada di Jawa Barat penelitian ini berimplikasi pada pengelolaan MKWK yang harus lebih terstruktur lagi, sehingga implementasi MKWK diterjemahkan dengan seragam. Kemudian penting untuk setiap sektor menurunkan egonya untuk mendukung kepentingan MKWK dan tidak hanya berfokus pada kepentingan prodinya masing-masing. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dari mulai tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan program studi. Serta menjalin kerjasama dengan *stakeholder* masyarakat untuk pelibatan masyarakat dalam proses pembelajaran MKWK.

5.2.4. Bagi Dosen yang Mengajar MKWK

Bagi dosen yang mengajar MKWK, penelitian ini berimplikasi pada pentingnya menurunkan ego individual untuk optimalnya tujuan MKWK pada setiap mahasiswa. Kemudian penting untuk memberikan pembelajaran yang tidak berfokus pada tuntutan konten saja namun juga internalisasi nilai-nilai karakter. Penting untuk menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar nyata bagi mahasiswa serta mengajar dengan sepenuh hati dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan teladan dan pembelajaran di luar kelas.

5.2.5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini memiliki implikasi bahwa penting untuk mengembangkan penelitian tentang strategi pengelolaan kepentingan agar setiap perguruan tinggi mudah dalam mengakomodir setiap kepentingan implementator MKWK. Kemudian penting juga untuk mengembangkan penelitian yang dapat memudahkan dosen untuk melakukan pembelajaran di kelas yang bermakna sesuai dengan tuntutan MKWK.

5.3 Rekomendasi

5.3.1. Bagi Dinas Pendidikan Tinggi

Rekomendasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dapat merancang ragam manfaat MKWK yang memiliki manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat secara luas dengan memperhatikan karakter moral dan karakter kinerja dan memastikan agar sosialisasi dan implementasinya optimal di setiap perguruan tinggi.

5.3.2. Bagi Perguruan Tinggi di Jawa Barat

Rekomendasi bagi perguruan tinggi di Jawa Barat yaitu *top* aktor di perguruan tinggi yang harus memiliki peran penting dalam mensinergikan kepentingan kampus dan kebijakan yang pemerintah. Kemudian *top* aktor juga merancang strategi untuk mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan MKWK dan menekan ego sektoral kampus. Alangkah baik juga membentuk unit khusus dalam mengelola MKWK untuk mengatasi segala masalah yang dapat menjadikan implementasi MKWK tidak optimal. Penting juga untuk memberikan dukungan kepada implementator di lapangan baik dari segi anggaran, sumberdaya dan jenjang karir. Serta merubah paradigma lama tentang MKWK agar implementasi sesuai dengan tantangan dan tuntutan jaman.

5.3.3. Bagi Setiap Fakultas dan Program Studi di Perguruan Tinggi yang Berada di Jawa Barat

Rekomendasi bagi fakultas dan program studi di perguruan tinggi yaitu melakukan pengelolaan MKWK yang harus lebih terstruktur lagi dan menurunkan egonya untuk mendukung kepentingan MKWK. Memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik dari mulai tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan program studi. Serta menjalin kerjasama dengan *stakeholder* masyarakat untuk pelibatan masyarakat dalam proses pembelajaran MKWK.

5.3.4. Bagi Dosen yang Mengajar MKWK

Bagi dosen yang mengajar MKWK penelitian ini merekomendasikan agar memberikan pembelajaran yang tidak berfokus pada tuntutan konten saja namun juga internalisasi nilai-nilai karakter. Penting untuk menjadikan

masyarakat sebagai sumber belajar nyata bagi mahasiswa serta mengajar dengan sepenuh hati dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan teladan dan pembelajaran di luar kelas.

5.3.5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini merekomendasikan agar mengembangkan penelitian tentang strategi pengelolaan kepentingan agar setiap perguruan tinggi mudah dalam mengakomodir setiap kepentingan implementator MKWK. Kemudian penting juga untuk mengembangkan penelitian yang dapat memudahkan dosen untuk melakukan pembelajaran di kelas yang bermakna sesuai dengan tuntutan MKWK.